

**REALISASI
PROGRAM LEGISLASI NASIONAL
RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS TAHUN 2014**

Berdasarkan Keputusan DPR-RI No. 03A/DPR RI/II/2013-2014 dan Keputusan DPR RI No. 02/DPR RI/I/2013-2014 terdapat 68 (enam puluh delapan) RUU yang menjadi prioritas Prolegnas Tahun 2014.

- Keputusan DPR RI No. 03A/DPR RI/II/2013-2014 tentang Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2014 menetapkan 66 (tujuh puluh) RUU sebagai prioritas Prolegnas Tahun 2013 dengan rincian, 23 (dua puluh tiga) RUU Prakarsa Pemerintah dan 43 (empat puluh tiga) RUU Prakarsa DPR
- Keputusan DPR RI No. 02/DPR RI/IV/2013-2014 tentang penetapan 2 (Dua) RUU tambahan dalam Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2014 dengan rincian 1 (satu) RUU Prakarsa Pemerintah dan 1 (satu) RUU Prakarsa DPR

NO	JUDUL RUU	PENYIAPAN RUU DAN NA	REALISASI	KETERANGAN (Untuk yang belum terealisasi)
1.	RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran	DPR		RUU dalam tahap Pembicaraan Tk. I di Komisi I
2.	RUU tentang Perjanjian Internasional	DPR		RUU dalam tahap Pembicaraan Tk. I di Komisi I
3.	RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah	Pemerintah	Disetujui pada rapat paripuna tanggal 26 September 2014	
4.	RUU Tentang Pertanahan	DPR		RUU dalam tahap Pembicaraan Tk. I di Komisi II
5.	RUU tentang Mahkamah Agung	DPR		RUU dalam tahap Pembicaraan Tk. I di Komisi III
6.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI	DPR		RUU dalam tahap Pembicaraan Tk. I di Komisi III

NO	JUDUL RUU	PENYIAPAN RUU DAN NA	REALISASI	KETERANGAN (Untuk yang belum terealisasi)
7.	RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Pemerintah		RUU dalam tahap Pembicaraan Tk. I di Komisi III
8.	RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	Pemerintah		RUU dalam tahap Pembicaraan Tk. I di Komisi III
9.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan	DPR		RUU dalam tahap Pembicaraan Tk. I di Komisi IV
10.	RUU tentang Jalan	DPR		RUU dalam tahap Pembicaraan Tk. I di Komisi V
11.	RUU tentang Perdagangan	Pemerintah	Telah disahkan menjadi UU No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan	
12.	RUU tentang Jaminan Produk Halal	DPR	Disetujui pada rapat paripuna tanggal 25 September 2014	
13.	RUU Tentang Tenaga Kesehatan	Pemerintah	Disetujui pada rapat paripuna tanggal 25 September 2014	
14.	RUU Tentang Keperawatan	DPR	Disetujui pada rapat paripuna tanggal 25 September 2014	
15.	RUU tentang Kesehatan Jiwa	DPR	Telah disahkan menjadi UU No 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa	
16.	RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Daerah	Pemerintah		RUU dalam tahap Pembicaraan Tk. I di Komisi XI
17.	RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian	Pemerintah	Disetujui pada rapat paripuna tanggal 23 September 2014	
18.	RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan	Pemerintah		Pembicaraan Tk.II (tidak dilanjutkan pembahasannya)
19.	RUU tentang Keamanan Nasional	Pemerintah		RUU dalam tahap Pembicaraan Tk. I di Pansus

NO	JUDUL RUU	PENYIAPAN RUU DAN NA	REALISASI	KETERANGAN (Untuk yang belum terealisasi)
20.	RUU Tentang Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	DPR		RUU dalam tahap Pembicaraan Tk. I di Pansus
21.	RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan	DPR		RUU dalam tahap Pembicaraan Tk. I di Pansus
22.	RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri	DPR		RUU dalam tahap Pembicaraan Tk. I di Pansus
23.	RUU tentang Pemerintahan Daerah	Pemerintah	Disetujui pada rapat paripurna tanggal 26 September 2014	
24.	RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat	DPR		RUU dalam tahap Pembicaraan Tk. I di Pansus
25.	RUU Tentang Keinsinyuran	DPR	Telah disahkan menjadi UU No 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran	RUU dalam tahap Pembicaraan Tk. I di Pansus
26.	RUU Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat	DPR		RUU dalam tahap Pembicaraan Tk. I di Pansus
27.	RUU tentang Kepalangmerahan	DPR		RUU dalam tahap Pembicaraan Tk. I di Pansus
28.	RUU tentang Perubahan Harga Rupiah	Pemerintah		RUU dalam tahap Pembicaraan Tk. I di Pansus
29.	RUU tentang Panas Bumi	Pemerintah	Disetujui oleh Paripurna DPR pada tanggal 26 Agustus 2014	
30.	RUU tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	Pemerintah	Telah disahkan menjadi UU No 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	

NO	JUDUL RUU	PENYIAPAN RUU DAN NA	REALISASI	KETERANGAN (Untuk yang belum terealisasi)
31.	RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara	DPR		RUU dalam tahap Pembicaraan Tk. I di Pansus
32.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.	DPR		RUU dalam tahap Pembicaraan Tk. I di Pansus
33.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta	Pemerintah	Disetujui pada rapat paripuna tanggal 16 September 2014	
34.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	DPR	Telah disahkan menjadi UU No 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
35.	RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi	DPR		Proses harmonisasi di Baleg
36.	RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi	DPR		Proses harmonisasi di Baleg
37.	RUU tentang Pengelolaan Ibadah Haji	DPR		Proses harmonisasi di Baleg
38.	RUU Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga	DPR		Proses harmonisasi di Baleg
39.	RUU Tentang Sistem Perbukuan Nasional	DPR		Proses harmonisasi di Baleg
40.	RUU tentang Hukum Disiplin Militer	DPR	Disetujui pada rapat paripuna tanggal 24 September 2014	
41.	RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia	DPR		Internal Pemrakarsa (Komisi I)

NO	JUDUL RUU	PENYIAPAN RUU DAN NA	REALISASI	KETERANGAN (Untuk yang belum terealisasi)
42.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	DPR		Internal Pemrakarsa (Komisi III)
43.	RUU tentang Konservasi Tanah dan Air	DPR	Disetujui pada rapat paripuna tanggal 30 September 2014	
44.	RUU Tentang Pencarian Dan Pertolongan	DPR	Disetujui pada rapat paripuna tanggal 16 September 2014	
45.	RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara	DPR		Internal Pemrakarsa (Komisi VI)
46.	RUU tentang Kesetaraan Gender	DPR		Internal Pemrakarsa (Komisi VIII)
47.	RUU Tentang Kebudayaan	DPR		Internal Pemrakarsa (Komisi X)
48.	RUU Tentang Kawasan Pariwisata Khusus	DPR		Internal Pemrakarsa (Komisi X)
49.	RUU Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan	DPR		Internal Pemrakarsa (Komisi XI)
50.	RUU tentang Perubahan atas UU No. 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.	DPR		Internal Pemrakarsa (Komisi XI)
51.	RUU tentang Pertembakauan	DPR		Internal Pemrakarsa (Baleg)
52.	RUU tentang Pengaturan Minuman Beralkohol	DPR		Internal Pemrakarsa

NO	JUDUL RUU	PENYIAPAN RUU DAN NA	REALISASI	KETERANGAN (Untuk yang belum terealisasi)
				(Baleg)
53.	RUU tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan	DPR		Internal Pemrakarsa (Baleg)
54.	RUU tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	DPR		Internal Pemrakarsa (Baleg)
55.	RUU tentang Perubahan atas UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.	DPR		Internal Pemrakarsa (Baleg)
56.	RUU tentang Etika Penyelenggara Negara	DPR		Internal Pemrakarsa (Baleg)
57.	RUU tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.	DPR		Internal Pemrakarsa (Baleg)
58.	RUU tentang Pengelolaan Keuangan Haji	Pemerintah	Disetujui pada rapat paripuna tanggal 30 September 2014	
59.	RUU tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.	Pemerintah		Sudah disampaikan Pemrakarsa kepada Presiden
60.	RUU tentang Administrasi Pemerintahan	Pemerintah	Disetujui pada rapat paripuna tanggal 26 September 2014	
61.	RUU tentang Rahasia Negara	Pemerintah		RUU sudah disampaikan Pemrakarsa kepada Presiden
62.	RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana.	Pemerintah		RUU sudah disampaikan Pemrakarsa kepada Presiden

NO	JUDUL RUU	PENYIAPAN RUU DAN NA	REALISASI	KETERANGAN (Untuk yang belum terealisasi)
63.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	Pemerintah	Disetujui pada rapat paripurna tanggal 24 September 2014	
64.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.	Pemerintah		RUU sudah disampaikan kepada DPR
65.	RUU tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.	Pemerintah		RUU sudah disampaikan Pemrakarsa kepada Presiden
66.	RUU tentang Kelautan	DPD	Disetujui pada rapat paripurna tanggal 30 September 2014	
RUU PRIORITAS TAMBAHAN TAHUN 2013				
67.	RUU tentang Perubahan atas UU No.6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia	Pemerintah		RUU sudah disampaikan Pemrakarsa kepada Presiden
68.	RUU tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan anak	DPR	Disetujui pada rapat paripurna tanggal 25 September 2014	
69.	RUU tentang RUU tentang Pemerintahan Otonomi Khusus Bagi Provinsi di Tanah Papua	Pemerintah		RUU sudah disampaikan kepada DPR

DAFTAR KUMULATIF TERBUKA

1.	RUU Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional	1. UU No 8 Tahun 2014 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik
----	---	--

		<p>Indonesia Dan Republik Korea Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of Korea On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters)</p> <p>2. UU No 9 Tahun 2014 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik India Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of India On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters)</p> <p>3. UU No 10 Tahun 2014 tentang Pengesahan International Convention For The Suppression Of Acts Of Nuclear Terrorism (Konvensi Internasional Penanggulangan Tindakan Terorisme Nuklir)</p> <p>4. UU No 13 Tahun 2014 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Republik India (Extradition Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of India)</p> <p>5. UU No 19 Tahun 2014 tentang Pengesahan Persetujuan Tentang Kerja Sama Industri Pertahanan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Turki (Agreement On Defense Industry Cooperation Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Turkey)</p>
2.	RUU Kumulatif Terbuka tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	1. UU No 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014
3.	RUU Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	<p>1. UU No 14 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat Di Provinsi Sulawesi Tenggara</p> <p>2. UU No 15 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah Di Provinsi Sulawesi Tenggara</p> <p>3. UU No 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara</p>

4.	RUU Kumulatif Terbuka tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang	
5.	RUU Kumulatif Terbuka Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi	